

BAB I

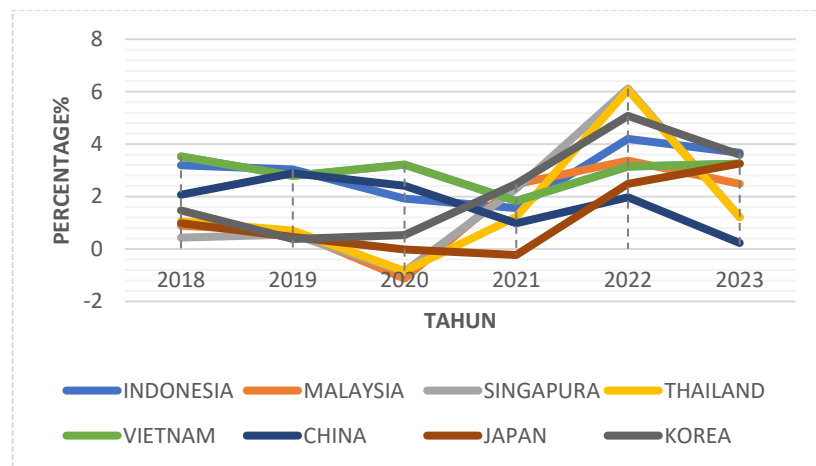
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inflasi merupakan indikator penting yang menandakan tingkat kestabilan ekonomi suatu negara karena secara langsung mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Inflasi yang rendah dan terkendali menunjukkan kestabilan harga yang sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Kondisi ini menjadi pondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan sosial, mengingat stabilitas harga dapat mencegah tekanan ekonomi yang memperburuk kesenjangan pendapatan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat Khan & Senhadji, (2001). Selain itu, inflasi yang stabil memberikan sinyal positif bagi pelaku usaha dan investor, karena menciptakan prediktabilitas dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan inflasi terkendali, biaya produksi lebih dapat diprediksi sehingga perusahaan lebih percaya diri dalam berinvestasi dan mengembangkan usahanya, yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan Ghosh, A.R., & Phillips, (1998).

Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang merugikan berbagai pihak. Kenaikan harga yang signifikan, terutama pada barang dan jasa pokok, dapat mengurangi daya beli masyarakat serta berdampak negatif pada konsumsi rumah tangga. Kondisi ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, menghambat investasi, dan memperbesar ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pengendalian inflasi merupakan hal yang sangat penting dalam kebijakan ekonomi. Stabilitas harga tidak hanya menjadi

tujuan jangka pendek, melainkan juga merupakan dasar untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Tanpa pengendalian inflasi yang tepat, upaya peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja akan semakin sulit dicapai Fischer, (1993) & Cukierman, (1999). Oleh sebab itu, menjaga inflasi agar tetap terkendali adalah langkah krusial dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merata dan adil bagi seluruh masyarakat.



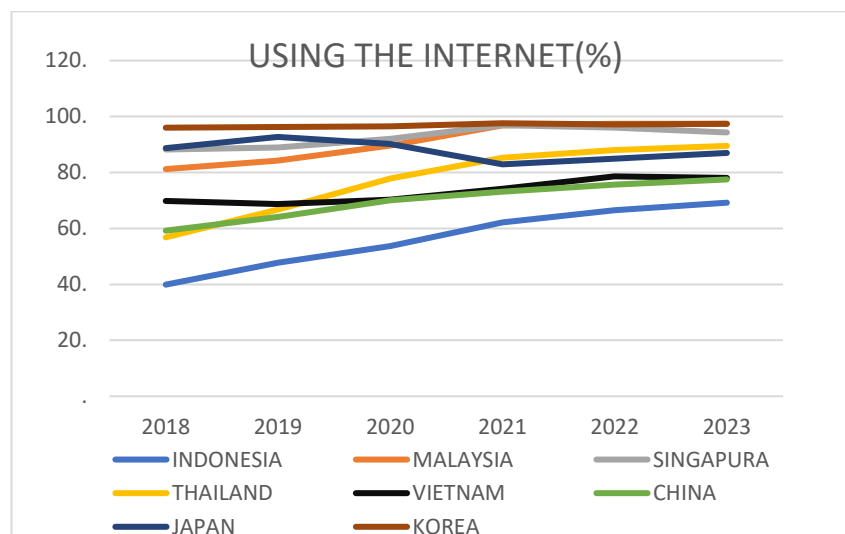
Gambar 1.1 Perkembangan inflasi Negara ASEAN 5+3 2018-2023

Sumber: www.worldbank.org

Gambar 1.1, tingkat inflasi di negara-negara ASEAN 5+3 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. Sebagian besar negara mengalami inflasi yang relatif terkendali selama tahun 2018 hingga 2019. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 menyebabkan gangguan pada rantai pasokan global, yang berdampak pada perubahan pola inflasi. Tahun 2020 bahkan mencatatkan deflasi di beberapa negara, seperti Malaysia (-1,13%), Singapura (-0,86%), dan Jepang (-0,02%). yang sejalan dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa dalam situasi resesi, permintaan agregat yang rendah dapat menyebabkan penurunan harga Keynes, (1936). Sementara itu, Vietnam dan

Indonesia masih mencatat inflasi positif, meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, menunjukkan ketahanan ekonomi mereka.

Pada tahun 2022, inflasi mengalami lonjakan signifikan di hampir semua negara sebagai akibat dari dampak global pasca pandemi, kenaikan harga komoditas, dan pengetatan kebijakan moneter. Singapura dan Thailand mencatat inflasi lebih dari 6%, Korea Selatan 5%, dan Indonesia 4%. Meskipun pada tahun 2023 inflasi mulai menunjukkan penurunan, beberapa negara berkembang masih mencatat tingkat inflasi di atas level sebelum pandemi. Kenaikan inflasi ini dipicu oleh harga energi dan pangan yang tinggi serta gangguan dalam rantai pasokan. Teori monetaris yang dikemukakan oleh (Friedman, 1968) menjelaskan bahwa inflasi disebabkan oleh peningkatan jumlah uang yang beredar, yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan selama masa krisis.



Gambar 1.2 Penggunaan Internet Negara ASEAN 5+3 2018-2023 (%)

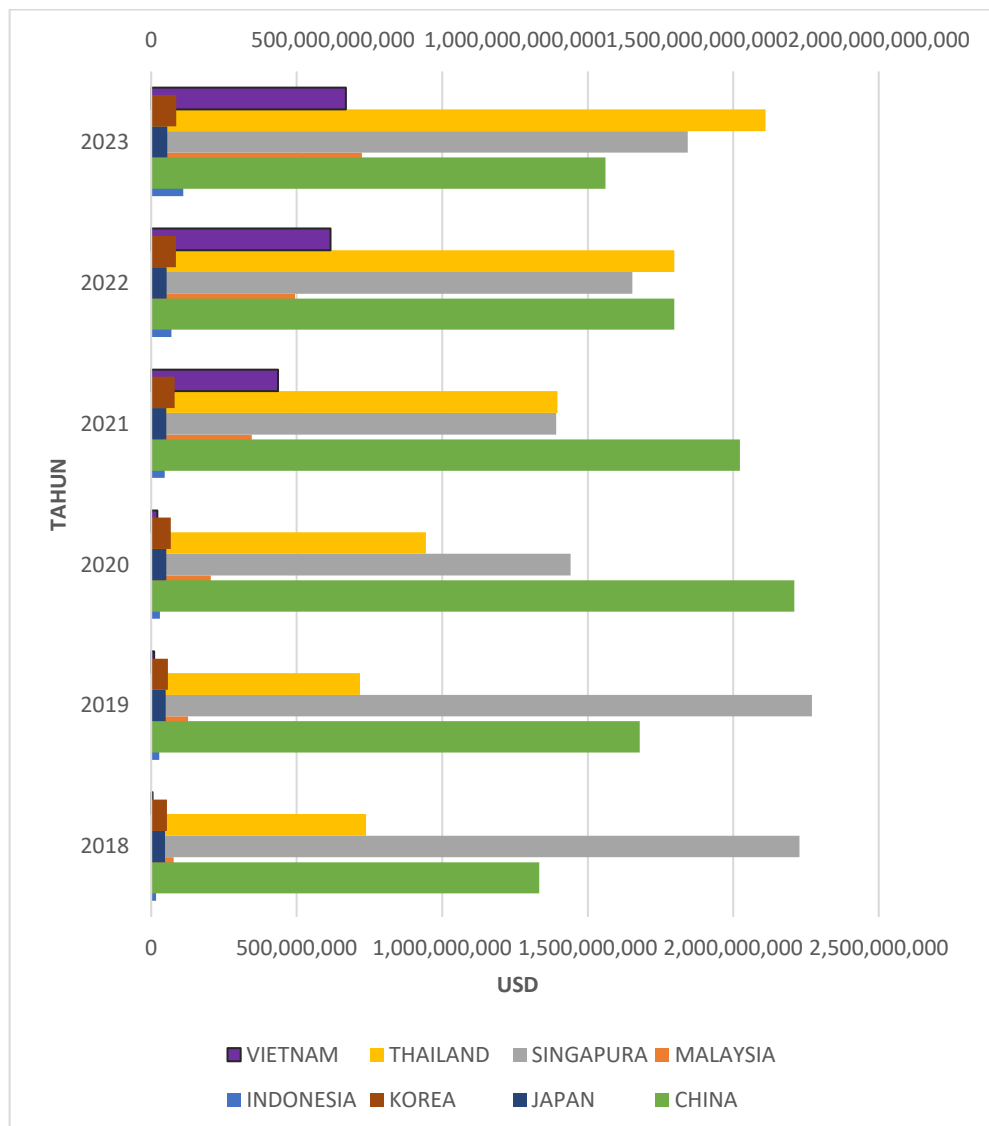
Sumber: www.worldbank.org

Berdasarkan data pada Gambar 1.2 yang menampilkan persentase pengguna internet di negara-negara ASEAN 5+3 dari tahun 2018 hingga 2023, terlihat adanya tren peningkatan penetrasi internet yang cukup signifikan di seluruh

negara dalam periode tersebut. Indonesia menunjukkan pertumbuhan pengguna internet yang terus meningkat dari 39,9% pada 2018 menjadi 69,2% pada 2023, menggambarkan perluasan akses teknologi digital di negara berkembang ini. Malaysia dan Korea Selatan mencatat tingkat penetrasi internet yang sangat tinggi dan stabil, masing-masing di atas 97%, menunjukkan tingkat kemajuan teknologi dan infrastruktur yang mapan.

Singapura dan Jepang sebagai negara maju mempertahankan penggunaan internet di level yang tinggi, masing-masing sekitar 94%-96% meskipun mengalami sedikit fluktuasi. Sementara itu, Thailand, Vietnam, dan China menunjukkan kenaikan yang konsisten dengan penetrasi internet mencapai kisaran 78% sampai 90%, menandakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akses digital di kawasan ini.

Data ini menunjukkan pergeseran signifikan menuju adopsi teknologi digital yang semakin luas di kawasan ASEAN 5+3. Peningkatan akses internet dapat memberikan dampak besar terhadap transformasi ekonomi dan sosial di negara-negara tersebut, termasuk dalam aspek kemajuan teknologi finansial, perubahan pola konsumsi, serta percepatan digitalisasi di berbagai sektor (World Bank, 2021). Oleh karena itu, pemahaman terhadap tren penggunaan internet ini menjadi sangat penting dalam konteks analisis pengaruh teknologi terhadap variabel ekonomi seperti inflasi yang menjadi fokus penelitian ini (Çoban, 2022).



Gambar 1.3 Nilai Transaksi E money Negara ASEAN 5+3 2018-2023 (US\$)

Sumber: <https://www.bi.go.id>, <https://www.bnm.gov.my>,
<https://www.mas.gov.sg>, <https://www.bot.or.th>, <https://www.sbv.gov.vn>,
<https://www.pbc.gov.cn/en/>, <https://www.boj.or.jp/en/>,
<https://www.bok.or.kr/eng/>

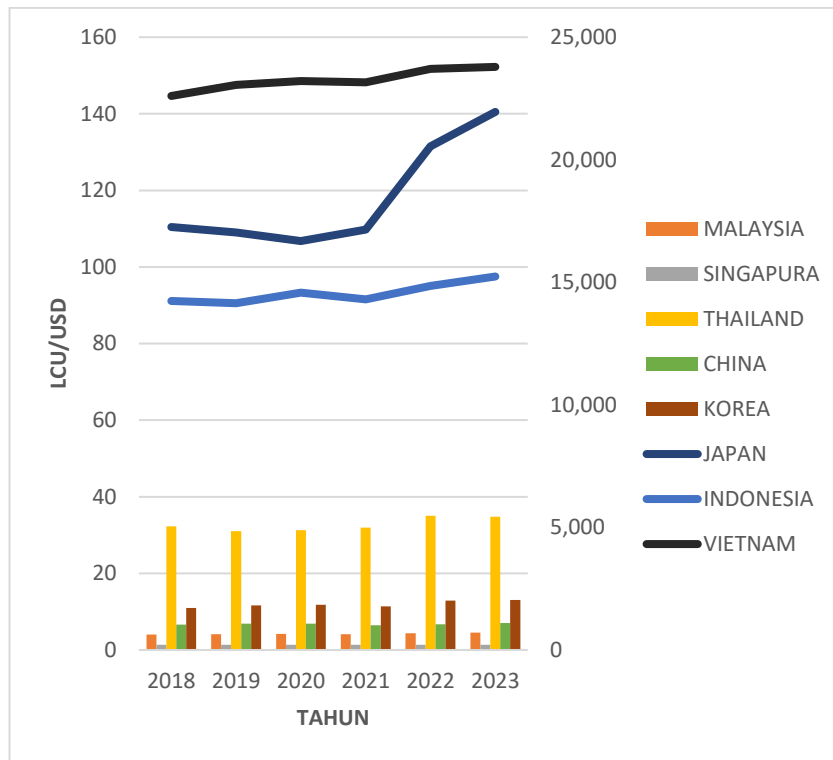
Gambar 1.3 menunjukkan Nilai transaksi digital atau e-money mengalami pertumbuhan pesat di semua negara yang diteliti, sejalan dengan meningkatnya digitalisasi sistem pembayaran dan adopsi teknologi keuangan di Asia. China mencatat transaksi e-money lebih dari 1 triliun USD per tahun, menjadikannya pelopor digitalisasi keuangan global. Korea Selatan dan Jepang juga menunjukkan

nilai transaksi signifikan berkat kemajuan infrastruktur teknologi mereka. Di Indonesia, meskipun nilai nominal lebih kecil, pertumbuhannya sangat cepat, dari sekitar 17 juta USD pada 2018 menjadi lebih dari 110 juta USD pada 2023. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan sistem pembayaran digital, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi tetapi juga berpotensi mempengaruhi transmisi kebijakan moneter dan inflasi.

Peningkatan transaksi digital berhubungan erat dengan digitalisasi ekonomi dan perubahan perilaku masyarakat. Pertumbuhan e-money yang pesat dapat mempercepat peredaran uang dan meningkatkan tekanan permintaan, berpotensi menjadi penyebab inflasi. Oleh karena itu, analisis variabel ini penting dalam konteks inflasi di era digital, mencerminkan teori Catch-Up Growth yang menunjukkan bahwa negara berkembang dapat mengejar ketertinggalan dalam adopsi teknologi (Abramovitz, 1986). digitalisasi transaksi, termasuk penggunaan e-money, telah mengubah interaksi masyarakat dan bisnis dengan sistem pembayaran, meningkatkan efisiensi ekonomi melalui percepatan pembayaran dan inklusi keuangan (Apriliantoa & Muslikhati, 2022). Namun, digitalisasi juga menantang kebijakan moneter tradisional, karena mengubah pola permintaan dan penawaran uang, serta memengaruhi respons masyarakat terhadap kebijakan suku bunga (Auer, R. A., & Böhme, 2020).

Bank sentral perlu menyesuaikan strategi dan regulasi untuk sistem pembayaran digital guna menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan literasi keuangan digital, sehingga dapat memaksimalkan manfaat digitalisasi tanpa mengorbankan efektivitas kebijakan moneter. Negara-negara ASEAN, dengan variasi dalam pertumbuhan ekonomi dan adopsi teknologi, menawarkan peluang untuk mengkaji interaksi antara kebijakan moneter, digitalisasi transaksi, dan

pengendalian inflasi, sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang diusulkan oleh (Aghion & Howitt, 2013) dan Rostow.



Gambar 1.4 Perkembangan Nilai Tukar Negara ASEAN 5+3 2018-2023 (LCU/USD)

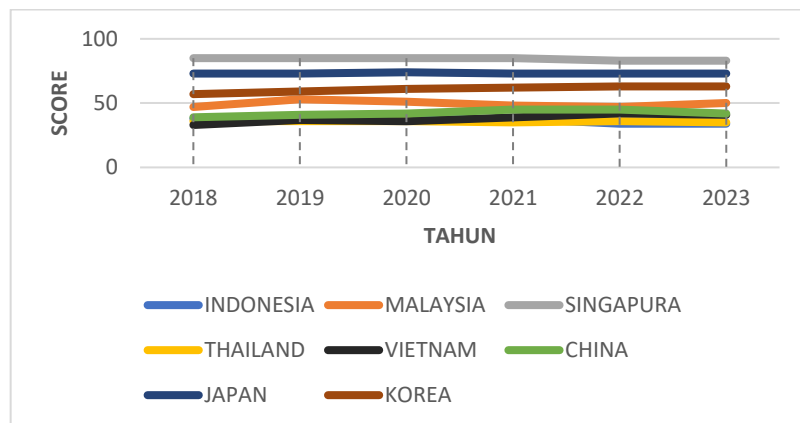
Sumber: www.worldbank.org

Berdasarkan data nilai tukar dari tahun 2018 hingga 2023 pada Gambar 1.4 tersebut, Data nilai tukar LCU/USD yang tercantum dalam file menunjukkan fluktuasi nilai tukar mata uang lokal terhadap Dolar AS dari tahun 2018 hingga 2023 untuk beberapa negara di Asia. Malaysia menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dimulai dari 4.03 pada tahun 2018 dan mencapai 4.56 pada tahun 2023. Singapura mengalami sedikit variasi, dengan nilai tukar yang relatif stabil, berkisar antara 1.34 hingga 1.37 selama periode tersebut. Thailand menunjukkan penurunan dari 32.31 pada tahun 2018 menjadi 34.8 pada tahun 2023, meskipun ada fluktuasi di tahun-tahun sebelumnya. China juga mengalami peningkatan, dari

6.61 pada tahun 2018 menjadi 7.08 pada tahun 2023, menunjukkan penguatan mata uangnya. Korea menunjukkan tren yang serupa, dengan nilai tukar meningkat dari 11.00 menjadi 13.05 dalam periode yang sama.

Jepang memiliki nilai tukar yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain, dimulai dari 110.42 dan meningkat signifikan menjadi 140.49 pada tahun 2023. Indonesia menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 14.236 pada tahun 2018 menjadi 15.236 pada tahun 2023, sementara Vietnam juga mengalami peningkatan, dari 22.602 menjadi 23.787 dalam periode yang sama. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan dinamika ekonomi dan kebijakan moneter yang berbeda di masing-masing negara, yang mempengaruhi nilai tukar mata uang lokal terhadap Dolar AS.

Perbedaan ini menggambarkan berbagai tekanan eksternal dan domestik yang memengaruhi kestabilan mata uang masing-masing negara serta memberikan gambaran penting tentang dinamika ekonomi regional dan pengaruhnya terhadap inflasi. Hal ini sejalan dengan teori paritas daya beli (Purchasing Power Parity) yang menyatakan bahwa nilai tukar antara dua mata uang akan berfluktuasi seiring dengan perbedaan tingkat inflasi di masing-masing negara (Mundell, 1963). Selain itu, teori kebijakan moneter juga menjelaskan bagaimana kebijakan suku bunga dan kontrol nilai tukar dapat memengaruhi nilai tukar dan inflasi (Friedman, 1968).



Gambar 1.5 Skor Indeks Persepsi Korupsi (score CPI) Negara ASEAN 5+3 2018-2023

Sumber: www.transparency.org

Korupsi adalah faktor non-ekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas kebijakan publik, termasuk kebijakan moneter dan fiskal. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang ditampilkan pada Gambar 1.5 menunjukkan bahwa negara-negara seperti Singapura dan Jepang memiliki skor tertinggi (83–85 untuk Singapura dan 73 untuk Jepang), yang menandakan tingkat korupsi yang sangat rendah serta tata kelola pemerintahan yang baik. negara-negara seperti Vietnam dan Thailand mencatatkan skor yang jauh lebih rendah, berada di kisaran 33–42, yang menunjukkan adanya persepsi korupsi yang tinggi. Indonesia sendiri mengalami penurunan skor dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan tantangan dalam reformasi tata kelola dan upaya pemberantasan korupsi, yang dapat mempengaruhi stabilitas makroekonomi dan kepercayaan investor.

Mauro, (1995) menjelaskan bahwa tingginya tingkat korupsi berkorelasi dengan rendahnya tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks makroekonomi, korupsi dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan melemahkan efektivitas pengendalian inflasi karena dana publik tidak digunakan secara optimal. perbedaan skor CPI di antara negara-negara tersebut

menunjukkan bahwa kondisi institusional dan tata kelola publik dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, termasuk laju inflasi.

Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian, sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Nugraheni *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa sistem pembayaran non-tunai dan jumlah uang beredar berhubungan dengan inflasi di Indonesia, menyoroti peran teknologi finansial. Harsono, (2023) menemukan bahwa e-money berdampak signifikan terhadap inflasi, sementara Narayan & Sahminan, (2018) menegaskan hubungan antara fintech dan inflasi, menunjukkan pentingnya inovasi keuangan. Haider *et al.*, (2011) dan Ayodeji, (2020) mengungkapkan bahwa ketidakstabilan politik dan korupsi berkontribusi pada inflasi, terutama di negara berkembang.

Studi-studi ini menekankan bahwa inflasi dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara kebijakan, teknologi, dan dinamika ekonomi global. dalam konteks negara-negara ASEAN. Penelitian oleh Romdhane, (2024) dan Ahmad *et al.*, (2024) menunjukkan dampak fintech dan faktor penawaran terhadap inflasi. Maitah *et al.*, (2024) menganalisis keterkaitan inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi, sementara Elkamel, (2019) menyoroti peran korupsi dan peminjaman pemerintah. Penelitian ini akan fokus pada sinergi kebijakan moneter, teknologi keuangan, dan faktor struktural lainnya terhadap inflasi, memberikan kontribusi baru dalam memahami fenomena ini di negara-negara ASEAN.

Penggunaan e-money yang meluas dapat meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga berpotensi menyebabkan inflasi terselubung tanpa pengawasan yang tepat (Wong *et al.*, 2020). (Blanchard, 2010). Di ASEAN, hubungan antara variabel makroekonomi menunjukkan variabilitas tinggi,

menyulitkan prediksi inflasi (AREO, 2025). Oleh karena itu, pemahaman interaksi antar variabel ini penting untuk pengembangan kebijakan ekonomi yang responsif. Penelitian ini fokus pada lima negara utama ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, yang dipilih berdasarkan kekuatan ekonomi dan adopsi teknologi digital, serta ketersediaan data untuk variabel penting (AREO, 2025).

Salah satu faktor penting dalam studi inflasi saat ini adalah kemajuan teknologi, terutama digitalisasi dan penetrasi internet. Çoban, (2022) serta Yi & Choi, (2005) menemukan bahwa internet dapat menekan inflasi dengan meningkatkan efisiensi pasar dan produktivitas. Selain itu, nilai tukar juga berpengaruh signifikan terhadap inflasi, seperti yang ditunjukkan oleh Sari & Nurjannah, (2023) di Indonesia, serta Hoang *et al.*, (2020) di Vietnam, di mana depresiasi mata uang menyebabkan kenaikan harga barang impor. Korupsi juga berkontribusi terhadap inflasi dengan mengurangi efisiensi dan kredibilitas kebijakan. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemajuan teknologi, nilai tukar, dan indeks korupsi terhadap inflasi di negara ASEAN 5+3, guna memberikan rekomendasi bagi kebijakan ekonomi regional yang berbasis bukti.

Sebagian besar penelitian sebelumnya masih membahas pengaruh teknologi, nilai tukar, dan korupsi terhadap inflasi secara terpisah dan terbatas pada satu negara. Selain itu, belum banyak studi yang secara komprehensif mengkaji ketiga variabel tersebut secara simultan dalam konteks kawasan ASEAN 5+3 yang memiliki karakteristik ekonomi dan institusional yang beragam. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis pengaruh kemajuan teknologi (melalui penetrasi internet), nilai tukar, dan indeks korupsi terhadap

inflasi secara simultan pada negara ASEAN 5+3. Studi ini menggabungkan pendekatan panel data lintas negara dengan fokus pada era digital, sehingga memberikan perspektif baru dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi inflasi di kawasan regional yang strategis.

Untuk memperluas hasil analisis penelitian ini melibatkan negara-negara ASEAN 5+3, termasuk China, Jepang, dan Korea Selatan, untuk menganalisis dampak ICT yang diwakilkan penetrasi, penggunaan e-money, nilai tukar, dan indeks persepsi korupsi terhadap inflasi. Dengan menggunakan pendekatan lintas negara, studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tantangan ekonomi di kawasan serta mendukung pengembangan kebijakan yang lebih adaptif (AREO, 2025). Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi dalam merancang kebijakan ekonomi yang adaptif di tingkat nasional dan regional, terutama dalam menghadapi volatilitas inflasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan di kawasan ASEAN+3.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubung dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kemajuan teknologi, yang diukur melalui penetrasi internet secara negatif berpengaruh terhadap tingkat inflasi di negara-negara ASEAN 5+3?
2. Apakah kemajuan teknologi keuangan, yg diwakili penggunaan e-money secara berpengaruh positif terhadap perubahan tingkat inflasi di negara-negara ASEAN 5+3?
3. Apakah pengaruh nilai tukar terhadap inflasi di negara-negara ASEAN 5+3, dan bagaimana fluktuasi nilai tukar memengaruhi harga barang dan jasa?

4. Apakah indeks persepsi korupsi (CPI) secara negatif memengaruhi tingkat inflasi di negara-negara ASEAN 5+3?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dampak penetrasi internet (ICT) terhadap inflasi di negara-negara ASEAN 5+3.
2. Menalisis kontribusi transaksi e-money terhadap dinamika inflasi di ASEAN 5+3.
3. Menganalisis pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap tingkat inflasi di kawasan ASEAN 5+3.
4. Menganalisis dampak korupsi (Indeks CPI) terhadap stabilitas harga di ASEAN 5+3.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, adapun meliputi:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini menawarkan manfaat teoritis dengan menambah wawasan tentang pengaruh kemajuan teknologi dan transaksi digital terhadap inflasi, terutama melalui pendekatan yang secara empiris memisahkan kedua variabel tersebut. Selain itu, studi ini juga berkontribusi pada literatur ekonomi makro dengan menggabungkan elemen teknologi, keuangan digital, nilai tukar, dan tata kelola (korupsi) dalam satu kerangka analisis yang menyeluruh.

2. Manfaat praktis

hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pengendalian inflasi di era digital. Temuan bahwa e-money dapat mendorong inflasi memberikan sinyal penting bagi otoritas moneter dalam mengatur arus transaksi digital secara hati-hati. bukti bahwa kemajuan teknologi berkontribusi pada penurunan inflasi mendukung investasi pada infrastruktur digital. Di sisi lain, pengaruh indeks korupsi terhadap inflasi menunjukkan pentingnya peningkatan tata kelola dan transparansi fiskal untuk menjaga stabilitas harga di kawasan ASEAN+3.